

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI POLITIK LUAR NEGERI FEMINIS SWEDIA TAHUN 2014-2017**

Dalam bab ini pembahasan akan memfokuskan terhadap penjelasan mengenai implementasi dari politik luar negeri feminis Swedia pada tahun 2014-2017 yang berupa dukungan dalam peningkatan representasi perempuan dalam politik di Somalia dan Moldova, mendukung Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mencapai kesetaraan gender, serta menerapkan gender marker dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Penjelasan mengenai implementasi tersebut diperkuat dengan penggunaan konsep feminisme dan konsep *soft power*.

Swedia adalah negara yang mengakui bahwa saat ini masih banyak perempuan yang ter subordinasi oleh laki-laki. Sehingga Swedia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi nilai kesetaraan gender mengeluarkan politik luar negeri feminis guna berusaha untuk setidaknya meminimalisir ketidaksetaraan gender yang masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Hal itu dilakukan Swedia dengan mengeluarkan politik luar negeri feminis. Maka hal ini sangat sesuai dengan konsep feminisme yang telah dipaparkan di awal penelitian ini. Kemudian, untuk melancarkan tujuannya menyebarkan ideologi feminis ke luar Swedia agar wilayah-wilayah yang masih mengalami ketidaksetaraan gender mulai tergerak untuk menyadari hal tersebut, Swedia menggunakan *soft power*-nya. Alat yang digunakan dalam *soft power* Swedia ini adalah bantuan luar negeri dan berbagai forum diskusi dan dialog dengan masyarakat, organisasi dan pemerintah setempat. Berikut beberapa bentuk implementasi *soft power* Swedia dalam menyebarkan ideologi feminisme sesuai dengan objektif negaranya, yaitu mencapai keadilan dan kesejahteraan

serta perdamaian dunia. Berikut bentuk-bentuk implementasinya :

### **A. Mendukung Peningkatan Representasi Perempuan dalam Politik di Somalia dan Moldova**

Kedutaan Besar merupakan kantor diplomatik suatu negara yang ditempatkan di ibu kota negara lain. Tugas kedutaan adalah untuk melancarkan hubungan diplomatik kedua negara yang terlibat dan sebagai naungan bagi warga negaranya yang berdomisili di negara tersebut. Melalui perwakilan tersebut, suatu negara dapat dengan lebih mudah untuk berkomunikasi langsung dengan negara yang bersangkutan. Kedutaan besar juga memiliki tujuan yaitu untuk menjalankan misi negaranya di negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan negaranya. Dalam kasus ini, Swedia adalah negara yang memiliki misi atau tujuan untuk menyebarkan isu kesetaraan gender ke berbagai belahan dunia dan mencapai kesetaraan gender dalam berbagai sektor, karena tujuan dari politik luar negeri Swedia sendiri adalah untuk menyebarkan paham feminisme agar tidak ada pihak manapun yang mengalami diskriminasi, khususnya perempuan yang bahkan sampai saat ini masih mengalami hal tersebut. Dengan begitu, kedutaan besar Swedia, khususnya di negara-negara berkembang atau bahkan di negara-negara yang masih memiliki stereotip dan menganggap rendah perempuan, memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mempengaruhi negara tersebut untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam berbagai bidang, khususnya politik. Karena, dengan terlibatnya perempuan dalam pengambilan keputusan, akan berdampak pada tercapainya perdamaian. Berikut pemaparan mengenai kinerja Kedutaan Besar Swedia di beberapa negara berkembang dalam meningkatkan representasi perempuan dalam parlemen di negara tersebut :

### A.1. Somalia

Somalia yang termasuk dalam 10 negara termiskin di dunia dengan diskriminasi terhadap perempuan yang masih cukup tinggi yang diakibatkan oleh sistem patriarki yang tertanam kuat di masyarakatnya, membuat Swedia sebagai negara maju dan feminis merasa perlu dan berkewajiban untuk ikut berpartisipasi dalam menangani perihal stereotip terhadap perempuan yang masih terjadi di Somalia tersebut. Selain itu, Swedia sebagai salah satu mitra Somalia, dimana hubungan diplomatik kedua negara dimulai sejak 13 Juli 1960<sup>72</sup>. Sudah banyak kerja sama yang dilakukan kedua negara demi mencapai kepentingan negaranya masing-masing. Semenjak Swedia menyatakan dirinya sebagai negara Feminis pada tahun 2014, sejak saat itu pula Swedia benar-benar gencar dalam mempromosikan isu kesetaraan gender sebagai kepentingan nasionalnya. Melihat Somalia dengan kondisi kesetaraan gender yang masih sangat rendah, selaku perwakilan pemerintah pusat Swedia di Somalia, kedutaan besar Swedia di Mogadishu, Somalia, berusaha untuk mempengaruhi Somalia untuk meningkatkan kesetaraan gender di negara ini melalui representasi perempuan di politik. Dalam mencapai hal tersebut, Swedia menggunakan cara-cara persuasive, yaitu melalui *soft power*. Seperti yang telah dipaparkan pada bab pertama mengenai konsep *soft power*, Swedia menggunakan alat-alat *soft power* untuk menyebarkan dan mendukung kesetaraan gender di Somalia, diantaranya melalui perjanjian dan bantuan luar negeri.

Pertemuan diskusi merupakan bagian dari kinerja kedutaan besar untuk melaksanakan *action plan* Swedia perihal wanita, perdamaian dan keamanan, di mana Somalia adalah salah satu negara fokus dan bagian dari inisiatif dialog dan proses perdamaian. Di Somalia, Kedutaan Besar Swedia telah memainkan peran yang cukup penting dalam

---

<sup>72</sup> Somali Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, "Somalia Diplomatic Relations", diakses dari <http://www.mfa.somaligov.net/Diplomatic%20Relations.html> pada 3 Juni 2018 pukul 16.14

meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlementer melalui kerjasama intensif dengan berbagai aktor dalam bentuk dialog, kerja sama pembangunan dan diplomasi publik.

Melalui dialog dan dukungan keuangan dari proses pemilihan umum di Somalia, Swedia adalah salah satu mitra utama internasional yang mempromosikan representasi peningkatan perempuan di parlemen, dengan target 30%. Pada September 2016, *National Leadership Forum of Somalia* (NLF), yang terdiri dari para pemimpin regional dan federal negara tersebut, memutuskan bahwa 30% kursi parlemen harus disediakan untuk perempuan. Keputusan ini berasal dari komitmen sebelumnya yang dibuat, akan tetapi tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah Somalia. Komitmen tersebut juga diperkuat sebagai hasil dari advokasi yang dilakukan oleh kelompok yang disebut sebagai C6+ yang mana Swedia termasuk didalamnya bersama dengan UNSOM (United Nations Assistance Mission in Somalia), IGAD (Intergovernmental Authority on Development), AU (African Union), Uni Eropa, Ethiopia, Inggris, Amerika Serikat dan Italia. Bulan-bulan berikutnya dan sepanjang proses pemilihan umum yang panjang dan sulit, Kedutaan Besar Swedia mengintensifkan dialog politiknya dan meningkatkan dukungan finansialnya untuk memungkinkan pelaksanaan target ambisius ini<sup>73</sup>. Pertemuan berulang kali dan percakapan telepon dengan pemimpin regional, pejabat pemilihan lokal serta pemimpin klan individu diperlukan untuk menjaga tekanan untuk menegakkan komitmen NLF tersebut.

Presiden Somalia juga menunjuk komite informal, yang disebut sebagai Duta Goodwill, yang terdiri dari para pemimpin perempuan yang diambil dari semua klan dan semua negara bagian di negara tersebut. Kelompok ini memainkan peran kunci dalam merumuskan dan menggerakkan strategi terperinci untuk peningkatan partisipasi dan perwakilan perempuan, hingga ke tingkat sub-sub-klan

---

<sup>73</sup> ibid

individu dan kursi parlemen, mengidentifikasi kursi manayang harus disediakan untuk perempuan.

Berbagai usaha advokasi telah dilakukan kedutaan besar Swedia dan negara-negara lain, namun target 30% representasi perempuan di parlemen ini masih belum tercapai, dimana saat ini di parlemen Somalia hanya terdapat sebanyak 24% representasi perempuan. Meskipun begitu, dukungan Swedia ini dianggap sebagai sebuah dorongan yang telah meningkatkan proporsi anggota perempuan di parlemen dari 14% menjadi 24% dalam pemilihan umum terakhir, yaitu pada 2016<sup>74</sup>. Meskipun begitu, angka representasi perempuan di parlemen tersebut meningkat sebanyak 10% dari pemilihan umum pada 2012 lalu. Hasil dari pemilihan umum terakhir ini, yang menghasilkan lebih banyak perempuan di parlemen dan perempuan yang menjabat sebagai menteri di pemerintahan, telah menanamkan harapan baru dan dilihat sebagai langkah maju yang penting dalam partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan.

Di antara aspek yang paling positif dari proses pemilu Somalia pada 2016 adalah mengenai peningkatan jumlah perempuan sebagai pemilih, yaitu hampir 30%. Pandangan konservatif pemimpin klan Somalia tentang peran perempuan secara terbuka ditantang, bahkan oleh banyak pemimpin politik laki-laki. Selain itu, momentum positif dari pemilihan parlemen tampaknya sangat dijunjung tinggi oleh kabinet Perdana Menteri Hassan Khaire, dimana ada 23% perempuan dalam utama kementeriannya, dan beberapa kunci komite parlemen akan dipimpin oleh perempuan. Selain itu, untuk menyoroti pentingnya partisipasi perempuan dalam proses politik, Swedia mengundang Asha Gelle, Ketua Duta Goodwill Somalia ke pertemuan Dewan Keamanan PBB perihal Somalia pada bulan Januari 2017<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup> Government Offices of Sweden, op.cit. hlm.11

<sup>75</sup> Sweden's Somalia Team, "Wided Political Space for Women in Somalia After Recent Elections", diakses dari <http://www.swemfa.se/campaign/widened-political-space-for-women-in-somalia-after-recent-elections/> pada 7 Juni 2018 pukul 02.32

Pada akhir Mei 2017, Kedutaan Besar Swedia bekerja sama dengan *The Folke Bernadotte Academy* (FBA), Kementerian Luar Negeri Somalia dalam bidang Konflik dan Kebijakan Kemanusiaan serta Lembaga Kehidupan dan Perdamaian, menyelenggarakan pertemuan sehari penuh di Mogadishu bagi perempuan Somalia untuk membahas mengenai peran dan partisipasi perempuan dalam pencegahan konflik, resolusi konflik dan pembangunan perdamaian. Pertemuan tersebut mengumpulkan sekitar 20 perempuan, terutama dari organisasi masyarakat sipil Somalia tetapi juga dari parlemen dan kepolisian, dipimpin oleh Marika Fahlén dari *The Swedish Network of Women Mediators* dan Eldridge Adolfo dari *FBA dialogue and mediation adviser*. Secara historis, perempuan memainkan peran informal penting dalam resolusi konflik di dalam klan Somalia. Diskusi ini berfokus pada pentingnya dan perlunya menyoroti perempuan pada tingkat yang lebih formal serta membangun perdamaian yang berkelanjutan. Selain itu, dalam diskusi tersebut juga dibahas mengenai pentingnya transisi sistem politik yang awalnya digerakkan oleh suatu suku menjadi sistem “satu orang, satu suara” dianggap sangat penting untuk memperkuat hak dan peluang yang setara bagi perempuan perempuan. Dalam diskusi ini juga disoroti mengenai perlunya melibatkan sejumlah peran pemuda yang tumbuh pesat di Somalia, menggarisbawahi bahwa investasi dalam penciptaan lapangan kerja adalah investasi dalam perdamaian. Ada konsensus yang cukup besar di antara para peserta diskusi tentang perlunya bekerja bersama untuk meningkatkan representasi perempuan, partisipasi aktif, dan kesempatan untuk mempengaruhi agenda perdamaian dan keamanan di Somalia. Para peserta juga meminta dukungan untuk mengembangkan dan memperdalam dialog dan keterampilan mediasi mereka.<sup>76</sup>

Advokasi yang dilakukan Swedia ini meskipun belum mencapai target 30% representasi perempuan di parlemen,

---

<sup>76</sup> Swedish Embassy in Mogadishu, “Somali Women Play Important Role in Conflict Resolution”, diakses dari <http://www.swemfa.se/campaign/somali-women-play-an-important-role-in-conflict-resolution/> pada 7 Juni 2018 pukul 02.21

tetapi setidaknya membuahkan hasil dalam meningkatnya representasi perempuan di parlemen Somalia sebesar 10%. Swedia akan terus mempromosikan kesetaraan gender di Somalia hingga akhirnya representasi perempuan setidaknya tercapai diatas 30%.

## A.2. Moldova

Swedia sebagai salah satu negara yang paling ambisius dalam menghapuskan subordinasi terhadap perempuan oleh laki-laki, melakukan berbagai cara untuk mencoba berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi di negara termiskin di Eropa ini. Swedia memberikan dukungan strategis untuk proses demokratisasi di Moldova secara keseluruhan dan, khususnya untuk menghasilkan perubahan pembangunan di negara tersebut dalam hal mempromosikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.

Baru-baru ini, Moldova mengalami fase penting dalam perkembangan politiknya dengan pemilihan parlemen yang diadakan pada November 2014, diikuti oleh pemilihan lokal di musim panas 2015. Fase penting ini tidak lepas dari peran Swedia. Berikut tabel mengenai representasi perempuan di Moldova dari tahun ke tahun :

Tabel 4.1 Representasi Perempuan dalam Parlemen di Moldova Tahun 1990-2014

Seat in the Parliament	Number of women in Parliament	Percentage of representation, %
1990- 1993	12 in 380	3,8
1994 - 1998	5 in 101	4,9
1998 - 2001	9 in 101	8,9
2001 - 2005	16 in 101	15,8
2005-2009	21 in 101	20,9
2009'07-2010	26 din 101	25,7
2010 - 2014	19 din 101	18,8

Sumber : Council of Europe 2013<sup>77</sup>

Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Moldova sejak kemerdekaannya pada tahun 1991, tujuh

<sup>77</sup> Daniela TERZI-BARBAROSIE, "Participation of women in public and political life in the Republic of Moldova - Report developed in the framework of the Eastern Partnership Facility of the Council of Europe", 2013, hlm. 15

perempuan terdaftar dalam daftar pemilihan partai politik dan sebagai calon independen untuk mencalonkan diri sebagai wakil dewan setempat. Terdapat juga 14 perempuan yang bertindak sebagai pengamat dalam pemilihan lokal dan memantau terjaminnya hak pemilihan orang-orang Roma pada hari pemilihan (dikarenakan di Moldova, orang Roma adalah kaum minoritas dan sering tidak diikutsertakan).

Pada pemilihan umum saat itu, 2 perempuan roma memenangkan pemilihan anggota dewan setempat. Kedua perempuan yang terpilih adalah Varvara Duminica yang bekerja selama dua tahun sebagai mediator komunitas Roma di Chetrosu, sebuah desa di distrik Drochia, yang terletak di Utara Moldova dan Laura Bosnea yang terpilih sebagai anggota dewan lokal di kota Rascani, juga di bagian utara negara itu. Dia juga menjadi anggota dewan lokal termuda di negara tersebut<sup>78</sup>.

Meskipun Moldova telah mencapai kemajuan, terutama dalam menyesuaikan kerangka hukum untuk perlindungan yang lebih baik dari kekerasan, dalam mempromosikan partisipasi politik dan perwakilan perempuan, memberantas kemiskinan ekstrem, dan bidang lainnya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Menurut Biro Statistik Nasional tahun 2011, ada sekitar 63% wanita di Moldova telah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dari pasangan mereka. Masih ada perbedaan upah yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan, dan perempuan masih kurang terwakili dalam politik dan dalam posisi pengambilan keputusan.

Di Moldova, sebagai perwakilan pemerintahan Swedia, Kedutaan Besar Swedia berfokus untuk berkontribusi pada lingkungan yang mempromosikan partisipasi politik perempuan. Sejak 2014, misalnya melalui program *Women in Politics* (WiP), yang dilaksanakan oleh sejumlah organisasi,

---

<sup>78</sup>SIDA Department for Europe and Latin America, "Sweden's Support to Women in Politics", diakses dari <https://www.sida.se/English/where-we-work/Europe/Moldova-/examples-of-results/swedens-support-to-women-in-politics/> pada 8 juni 2018 pukul 13. 51



program ini membantu mendorong pengembangan kapasitas para kandidat perempuan sebelum, selama dan setelah pemilihan di tingkat pusat dan daerah. Melalui program WiP ini, Swedia berkontribusi yaitu dengan hasil Moldova mengadopsi undang-undang pada tahun 2016 yang menetapkan bahwa daftar partai sehubungan dengan pemilihan parlemen, pemerintah, sekretariat parlemen dan lembaga negara lainnya harus memasukkan setidaknya 40% perempuan dalam posisi yang dapat dipilih<sup>79</sup>.

Swedia adalah mitra jangka panjang untuk Moldova dalam mempromosikan kesetaraan gender dan hak asasi perempuan melalui dialog politik dan melalui program kerja sama pembangunan. Pada tanggal 19 September 2016, Pemerintah Swedia, diwakili oleh Kedutaan Besar Swedia di Moldova, dan UN Women Moldova, Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, telah menandatangani perjanjian baru untuk periode 2016-2020. Kesepakatan ini mendukung implementasi Nota Strategi Perempuan PBB untuk Moldova yang bertujuan untuk terus memberdayakan perempuan di Moldova, terutama kelompok yang paling rentan. Kontribusi finansial Swedia total adalah sekitar 20 Juta Krona Swedia atau sekitar 2,36 juta Dolar AS. Dengan dukungan Swedia, UN Women Moldova akan terus memimpin pendekatan inovatifnya untuk memecahkan ketidaksetaraan di tiga arah utama pekerjaannya, yaitu:

- Perempuan dalam Kepemimpinan
- Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
- Menghilangkan Kekerasan Terhadap Perempuan

Kedutaan Besar Swedia selalu memandang UN Women Moldova sebagai salah satu mitra strategisnya. Bagi Swedia, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan prioritas utama bagi pemerintahan dalam negeri dan dalam kerjasama pembangunan internasional kita di luar

---

<sup>79</sup> Government Offices of Sweden, op, cit, hlm. 11

negeri. Kebijakan luar negeri feminis yang sedang diupayakan oleh Pemerintah Swedia juga diterjemahkan ke dalam tindakan di lapangan dengan bermitra bersama UN Women selama bertahun-tahun. Bagi pemerintah Swedia, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah sesuatu yang tidak dapat diperbaiki dengan instan. Sehingga membutuhkan waktu untuk bekerja dalam jangka panjang, membutuhkan ketekunan, keyakinan, dan komitmen. Kesetaraan tidak hanya meningkatkan kehidupan wanita, tetapi juga meningkatkan masyarakat secara keseluruhan.

UN Women adalah organisasi PBB yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Demikian juga, Swedia memiliki tradisi panjang dalam mendukung kesetaraan gender dan merupakan pemimpin dunia dalam mencapainya. UN Women Moldova telah memulai kerja sama dengan Kedutaan Swedia di tahun 2007 (sebagai UNIFEM)<sup>80</sup>.

Mulai dari Juni 2014 Swedia, dalam kemitraan dengan UN Women, UNDP, *East Europe Foundation* dan *Center Partnership for Development*, mendukung program komprehensif “Perempuan dalam Politik”. Tujuan Keseluruhan dari Proyek ini adalah untuk mendukung peningkatan partisipasi perempuan dalam politik dan dalam proses pengambilan keputusan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk partisipasi mereka yang berarti, dan untuk mendukung pengembangan kapasitas perempuan sebelum, selama dan setelah pemilihan di pusat dan tingkat lokal.

Sebagai hasil dari pembangunan kapasitas yang besar untuk kandidat dan calon perempuan dalam pemilihan, 56 kandidat perempuan dari 13 partai politik dan satu blok pemilu telah meningkatkan keterampilan komunikasi, media, dan

---

<sup>80</sup> UNDP, “*The Government of Sweden and UN Women Signed A New Agreement to Promote Gender Equality and Women Human Rights in Moldova*”, diakses dari <http://md.one.un.org/content/unct/moldova/en/home/presscenter/press-releases/guvernul-suediei-i-un-women-moldova-au-semnat-un-nou-acord-pentr.html> pada 8 Juni 2018 Pukul 13.07

kampanye mereka. Para perempuan yang dilatih ini terpilih sebagai anggota parlemen dan perwakilan perempuan di Parlemen Moldova telah meningkat 2%. Pelatihan kandidat perempuan dalam pemilihan umum secara umum juga berkontribusi pada peningkatan representasi perempuan sebesar 2% dalam jumlah perempuan yang terpilih di kantor walikota<sup>81</sup>.

## **B. Mendukung Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Meningkatkan Kesetaraan Gender**

Swedia sebagai negara maju dan memiliki *high profile* didunia, tentunya sangat memanfaatkan forum-forum internasional dalam memperoleh kepentingan nasionalnya. Meskipun Swedia mengakui dirinya sebagai negara yang netral dengan masih tidak bergabungnya dengan NATO (The North Atlantic Treaty Organization) , bukan berarti Swedia tidak bergabung dengan organisasi-organisasi internasional lainnya dan tidak memiliki hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara lain. Melalui forum internasional tersebut, Swedia berusaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang berupa kepentingan immaterial, yaitu dengan dapat mempengaruhi negara lain. Kepentingan immaterial disini adalah pengaruh ideologi. Swedia yang menyatakan dirinya sebagai negara feminis pertama tentunya berkeinginan besar untuk dapat menyebarkan ideologi feminis tersebut, sehingga kesetaraan gender dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari Politik Luar Negeri Feminis Swedia.

Kementerian Luar Negeri Swedia telah mengungkapkan proses implementasi politik ini akan berjalan dengan intensif, melalui 6 objek terpenting dalam menjalankan misi politik luar negerinya, diantaranya hak asasi manusia, terbebas dari kekerasan, partisipasi perempuan dalam

---

<sup>81</sup>SIDA Department for Europe and Latin America, "Sweden's Support to Women in Politics", diakses dari <https://www.sida.se/English/where-we-work/Europe/Moldova/examples-of-results/swedens-support-to-women-in-politics/> pada 8 juni 2018 pukul 13. 51

upaya perdamaian, partisipasi perempuan dalam politik, Pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan hak seksual dan reproduksi (SRHR)<sup>82</sup>.

Swedia terpilih menjadi presiden Dewan Keamanan PBB pada tahun 2018-2019 . Selama Kepresidenan Swedia , Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mendukung ambisi Swedia bagi PBB untuk mempromosikan perdamaian dan pencegahan konflik, melakukan berbagai dialog sebagai alat mempromosikan kesetaraan gender, dan partisipasi aktif perempuan dalam proses perdamaian. Swedia adalah rekan yang sangat penting bagi PBB. Swedia akan menjadi ujung tombak pelaksanaan Agenda 2030, baik secara global maupun di Swedia. Semua bidang kebijakan harus berkontribusi pada dunia yang berkelanjutan dan adil<sup>83</sup>.

Untuk menjalankan 6 tujuan dari politik luar negeri feminis Swedia tersebut, Swedia menggunakan *soft power* yang dimilikinya. Dalam kasus ini, *soft power* yang digunakan Swedia sebagai alat adalah bantuan luar negeri. Seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa Swedia adalah negara feminis yang sangat mendukung tercapainya kesetaraan gender dalam berbagai hal. Sebagai anggota yang dapat dikatakan sangat berkontribusi besar dalam UE dan PBB, Swedia termasuk salah satu donator terbesar dalam organisasi internasional ini. Demi mencapai keenam tujuan dalam politik luar negeri feminisnya, Swedia sangat mendukung berbagai kegiatan yang diadakan oleh badan-badan UE dan PBB. Dukungannya ini berupa mempromosikan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kedua organisasi tersebut perihal kesetaraan gender khususnya, dan dengan memberikan bantuan finansial agar program-program kesetaraan gender yang dibuat oleh organisasi tersebut berjalan dengan lancar. Itulah cara-cara Swedia dalam menerapkan *soft powernya* guna

---

<sup>82</sup>SRHR adalah Sexual and Reproductive Health and Rights

<sup>83</sup>Government of Sweden, "Sweden's Presidency of The United Nations Security Council , January 2017", diakses dari <https://www.government.se/articles/2017/01/swedens-presidency-of-the-united-nations-security-council-january-2017/> pada 12 mei 2018 pukul 09.34

menyebarkan ideologi feminisme yang dianutnya. Berikut penjelasan lebih lanjutnya :

### **B.1. Uni Eropa (UE)**

Swedia adalah salah satu negara anggota UE dan negara yang sangat ambisius dalam mencapai kesetaraan gender. Sebagai negara feminis pertama di dunia yang bertekad keras untuk terus mendukung dalam mengangkat isu-isu kesetaraan gender, melalui keanggotaannya di Dewan Eropa, Swedia berpartisipasi aktif dalam Komisi Kesetaraan Gender dan berbagi pengalamannya kepada negara-negara anggota lainnya sebagai negara anggota yang telah menerapkan strategi Dewan Uni Eropa perihal kesetaraan gender. Strategi Uni Eropa perihal gender misalnya Strategy for Equality tahun 2010-2015 yang dilanjutkan untuk tahun 2016-2019 serta Gender Action Plan 2016-2020. Dalam Strategy for Equality tahun 2010-2019 ini ada 5 poin yang menjadi prioritas dalam aksinya, yaitu kemandirian ekonomi yang setara bagi perempuan dan laki-laki, upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, kesetaraan dalam pengambilan keputusan, bermartabat, integritas dan mengakhiri kekerasan berbasis gender, serta mempromosikan kesetaraan gender diluar UE<sup>84</sup>. Sedangkan *Gender Action Plan 2016-2020* (EU GAP-II) adalah kerangka kerja UE untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di negara-negara mitra serta dalam forum dan agenda internasional. Tujuan dari EU GAP-II adalah untuk mencapai kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)<sup>85</sup>.

---

<sup>84</sup>European Commission, "Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019", diakses dari [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019\\_en](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/eu-policy/strategic-engagement-gender-equality-2016-2019_en) pada 8 Juni 2018 pukul 14.02

<sup>85</sup>European Parliament, "EU Gender Action Plan 2016-2020 at year one: European Implementation Assessment", diakses dari [www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS\\_STU%282017%29603256](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29603256) pada 8 Juni 2018 pukul 14.02

Dengan adanya strategi strategi UE ini, Swedia sebagai negara anggota tetap dan aktif Swedia juga berkontribusi secara finansial untuk pelaksanaan rencana aksi Dewan Eropa bagi berbagai negara anggota. Selain itu, seorang ahli Swedia telah melatih tim pengarusutamaan gender. Swedia juga telah melakukan kampanye yang sukses agar seorang ahli gender Swedia terpilih dalam *The Council of Europe's Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings* (GRETA), yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan Konvensi Dewan tentang Aksi Melawan Perdagangan Manusia<sup>86</sup>. Swedia menekan Komisi Eropa untuk menjadi pendukung SRHR yang lebih kuat dan sertakan SRHR dalam laporan tahunan Komisi tentang pelaksanaan Rencana Aksi Uni Eropa tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam hubungan eksternal UE. Swedia juga merupakan kekuatan pendorong perihal SRHR dalam Dewan UE tentang kesetaraan gender dalam kerja sama pembangunan sejak Mei 2015 dan terus mengejar masalah ini dalam kinerja kebijakan pembangunan baru Uni Eropa<sup>87</sup>.

Selain itu, Swedia membantu mengembangkan upaya UE melalui proposal untuk meningkatkan *European External Action Service* (EEAS) mengenai kekerasan seksual berbasis gender dengan menggunakan data gender dan usia terpilah. Swedia juga mendorong UE untuk memiliki pendekatan yang responsif gender pada isu-isu mengenai ekstremisme kekerasan<sup>88</sup>. Swedia mengambil peran utama dalam kerja sama negara anggota Uni Eropa untuk memperkuat penerapan agenda Uni Eropa untuk wanita, perdamaian, dan keamanan. Misalnya, Swedia memulai penelitian yang dilakukan oleh *The European External Action Service* (EEAS) tentang kesetaraan gender dan upaya hak asasi manusia dalam operasi manajemen

---

<sup>86</sup> *Sweden's Feminist Foreign Policy Examples from Three years of Implementation*, Government Offices of Sweden, 2017, hlm. 4

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>88</sup> *ibid*

krisis Uni Eropa. Studi ini mengidentifikasi kekurangan di seluruh proses, dari perencanaan hingga implementasi dan tindak lanjut operasi, dan merupakan titik awal yang penting untuk upaya di masa depan, baik secara internal maupun eksternal<sup>89</sup>.

Mendorong pelaksanaan Rencana Aksi Uni Eropa tentang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi 2015–2019, yang fokusnya termasuk memperkuat aktor lokal dan organisasi masyarakat sipil dan menyoroti perempuan sebagai agen perubahan. Swedia juga telah memastikan bahwa EU *Gender Action Plan* 2016–2020 (GAP II) mengenai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam hubungan eksternal UE telah dibahas dalam kelompok kerja Dewan dan Komite Politik dan Keamanan UE (EU Political and Security Committee), dengan demikian mengingatkan kembali lembaga-lembaga dan negara-negara anggota perihal tanggung jawab mereka<sup>90</sup>.

Dalam *Istanbul Convention* (Konvensi Istanbul) yang diadakan tahun 2011 namun mulai dilaksanakan sejak 2014, Swedia mendorong negara-negara Uni Eropa dan negara lainnya untuk mengimplementasikan “The Council of Europe Convention” dalam usaha untuk mencegah dan memerangi kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan domestik. Dalam *The Council of Europe Convention* sendiri yang diadopsi sejak 3 Mei 2005 dan mulai dilaksanakan 1 Februari 2008 berisi perihal aksi melawan penjualan manusia. Isi dari konvensi ini sesuai dengan konvensi Istanbul yang berisi perihal melindungi perempuan dari berbagai macam bentuk kekerasan.

## **B.2. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)**

Swedia adalah salah satu donor utama untuk sistem PBB karena Swedia memberikan kontribusi sukarela yang

---

<sup>89</sup>Ibid, hlm. 8

<sup>90</sup> Ibid, hlm.10

cukup besar setiap tahunnya kepada badan-badan khusus PBB. Menurut PBB, Swedia adalah donor keuangan terbesar keenam. Kontribusi yang diberikan Swedia khususnya dalam bidang-bidang yang bergerak dalam bidang kesetaraan gender. Salah satu poin dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah perihal kesetaraan gender, itu mengapa Swedia memiliki kontribusi yang cukup besar dalam PBB karena sangat sesuai dengan tujuan dari politik luar negeri feminis. Sebagai contohnya, Swedia telah menggunakan pertemuan multilateral dan bilateral untuk memperkuat hak asasi perempuan dan anak perempuan yang menjadi pengungsi atau migran dengan menekankan hubungan antara pemindahan dan migrasi dan peningkatan resiko perdagangan manusia, prostitusi, kekerasan berbasis seksual dan gender, dan kurangnya akses ke SRHR dan perawatan kesehatan, air, sanitasi dan kebersihan. Swedia juga telah berhasil mengambil tindakan untuk memastikan bahwa isu-isu ini dimasukkan dalam resolusi PBB dan dalam deklarasi dari KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) PBB untuk pengungsi dan migran 2016, di mana posisi Swedia tercermin dalam komitmen untuk memastikan perempuan menikmati sepenuhnya hak asasi manusia dan partisipasi mereka dalam solusi pengembangan<sup>91</sup>.

Di Dewan Keamanan PBB, Swedia telah membantu menjadikan kekerasan berbasis seksual dan gender sebagai kriteria pencatatan dalam rezim sanksi. Selain itu, Swedia telah mengambil tindakan untuk memastikan bahwa isu-isu gender diperhitungkan dalam pelaksanaan *action plan* Sekretaris Jenderal PBB untuk mencegah ekstremisme kekerasan<sup>92</sup>.

Swedia juga mengambil peran utama dalam *the International Gender Champions Geneva initiative* yang menyatukan lebih dari 120 duta besar PBB, kepala organisasi PBB dan pemimpin organisasi masyarakat sipil, dan yang

---

<sup>91</sup>Ibid, hlm. 6

<sup>92</sup> Ibid



mendorong anggota untuk membuat komitmen untuk memperkuat kesetaraan gender dalam organisasi dan kerja mereka<sup>93</sup>. Disisi lain, Swedia bekerja secara aktif untuk meningkatkan kesadaran akan dampak keputusan kebijakan perdagangan terhadap perempuan dan laki-laki, termasuk melalui studi oleh *The National Board of Trade on trade, social sustainability and gender equality* dan seminar tentang perdagangan dan gender yang diadakan selama *The Fifth Global Review of Aid for Trade*. Swedia juga telah mendanai Konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan yang menghasilkan *the ex-ante gender assessment of trade measures* yang diluncurkan pada bulan Juli 2017<sup>94</sup>. Alat *the ex-ante gender assessment of trade measures* ini diterapkan dengan tujuan agar dapat memprediksi kemungkinan dampak dari perdagangan. Hal ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apa yang akan terjadi pada perempuan apabila kebijakan perdagangan tertentu diterapkan. Menurut Simonetta Zarrilli, kepala perdagangan, gender dan program pembangunan UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), membangun hubungan yang jelas antara kebijakan perdagangan dan tujuan menyeluruh, termasuk kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan akan semakin berkontribusi dalam menjadikan perdagangan sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan. Sehingga alat ini dapat berkontribusi besar dalam mencapai kesetaraan gender sekaligus mencapai pembangunan yang berkelanjutan<sup>95</sup>.

UN Women sebagai badan aktif PBB dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, dimana Swedia sendiri memainkan peran sentral sebagai yang bertanggung jawab

---

<sup>93</sup> Ibid

<sup>94</sup> Ibid, hlm.12

<sup>95</sup> Eva Gonzales, "UNCTAD Launches tool to measure impact of trade agreements on women's economic empowerment", diakses dari <https://eastwind.es/en/unctad-launches-tool-to-measure-impact-of-trade-agreements-on-womens-economic-empowerment/> pada 13 Juni 2018 pukul 22.04

dalam mengkoordinasi badan-badan PBB dalam kinerjanya perihal kesetaraan gender dan sebagai kunci dalam usaha-usaha mencapai eksetaraan gender di PBB, maka Swedia mendukung *United Nations Population Fund* (UNFPA) secara penuh, dimana pada tahun 2014–2015 karena bantuan dan dukungan keras Swedia, memungkinkan organisasi ini untuk mencegah 657.000 kehamilan yang tidak direncanakan, 204.400 aborsi yang tidak aman dan 978 kasus kematian ibu melahirkan, dan menyediakan kontrasepsi untuk 1,6 juta orang. Dukungan Swedia terhadap UNFPA juga telah menghasilkan sekitar 90 komunitas lokal meninggalkan mutilasi genital pada perempuan<sup>96</sup>. Berikut daftar mengenai bantuan inti Swedia kepada badan-badan khusus PBB sebagai bentuk tanggungjawab dan kinerja Swedia dalam mendukung dan mempromosikan isu kesehatan dan hak reproduksi dan seksual serta isu yang berfokus pada isu perempuan serta kesetaraan gender :

---

<sup>96</sup> Ibid, hlm.14

Tabel 4.2 Bantuan Inti Swedia kepada Badan-badan Khusus PBB

<b>Badan Khusus PBB</b>	<b>Total Bantuan Finansial (Juta USD)</b>	<b>Tahun</b>
UN Women	8,3	2015
UNFPA	57,5	2015
UNCERF	48,6	2015
UNAIDS	23,7	2015
UNCDF	2,9	2015
UNWFP	65,2	2015
UNPBF	6,8	2015
UNHCR	75,9	2015
UNICEF	62,3	2015
UNODC	4,2	2015
UN WOMEN	12	2016
UNDP	71,9	2016
UNWFP	121	2016
UNFPA	59,1	2016
UNDP	70,1	2017
UNICEF	81,7	2017
UNFPA	63,8	2017
UNAIDS	28,6	2017
UN OHCHR	15,4	2017
UN WOMEN	17,2	2017
UN CERF	75	2017

Source : Swedish Ministry of Foreign Affairs

### **C. Menerapkan Gender Marker dalam Memberikan Bantuan Luar Negeri**

Perempuan sangat rentan terhadap dampak konflik bersenjata. Mereka adalah aktor penting tetapi juga sangat rentan. Perempuan dari negara yang terkena dampak konflik harus muncul di semua bagian dari proses perdamaian, proses negosiasi, dialog pembangunan kepercayaan (*confidence-building dialogue*) dan untuk mengimplementasikan dan memantau perjanjian perdamaian. Perempuan juga harus termasuk dalam upaya perdamaian dan keamanan internasional dan bantuan kemanusiaan yang harus didasarkan pada perspektif gender. Perempuan harus berpartisipasi dalam upaya untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual, tidak hanya untuk mencapai perbaikan jangka panjang dan berkelanjutan dari situasi kemanusiaan. Kebijakan keamanan dan pembangunan Swedia menekankan pentingnya pencegahan dan pengelolaan kekerasan yang berbasis pada gender dan penjualan seksual, kedalam pertimbangan khusus dalam kasus HIV dan Aids di banyak negara yang mengalami dampak konflik.

Bantuan kemanusiaan merupakan salah satu bagian dari politik luar negeri. Swedia yang sejak 2014 telah mengadopsi politik luar negeri feminis, dimana dalam setiap aspek politik luar negerinya harus memuat perspektif feminis, begitupun dalam bidang bantuan kemanusiaan. Selama ini, bantuan kemanusiaan hanya diberikan kepada wilayah yang terkenal konflik maupun bencana, tanpa adanya analisis apakah bantuan kemanusiaan yang diberikan tersebut benar-benar telah tersalurkan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, pemerintah Swedia yang menyatakan dirinya sebagai negara feminis pertama melakukan suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh negara manapun.

Swedia sebagai negara yang memiliki sistem politik luar negeri feminis, membuat komitmen konkrit untuk memastikan bahwa kesetaraan gender, perspektif gender dan

langkah-langkah untuk memerangi kekerasan seksual yang berbasis gender dapat selalu terintegrasi dalam bidang kemanusiaan dan proses reformasi kemanusiaan. Misalnya, Swedia telah berkomitmen untuk memastikan bahwa orang-orang yang terkena dampak krisis memiliki pengaruh lebih besar atas upaya-upaya kemanusiaan, dan hanya mendukung para pelaku kemanusiaan (yang dimaksud adalah negara, organisasi atau siapapun yang bekerja dalam bidang kemanusiaan) yang mendasarkan pekerjaan mereka pada analisis gender dan data gender dan usia terpilah. Swedia juga secara konsisten menekankan pentingnya perspektif gender dalam hukum humaniter internasional (IHL), termasuk pada KTT Kemanusiaan Dunia di Istanbul pada tahun 2016<sup>97</sup>.

Dalam bidang bantuan kemanusiaan, ada 4 prinsip fundamental yang perlu ditekankan, yaitu ; kemanusiaan (Humanity),netralitas (Neutrality), ketidakberpihakan (Impartiality) dan kebebasan (Independence). Politik luar negeri feminis Swedia ini ada untuk melengkapi dan memperkuat empat prinsip inti dari bantuan kemanusiaan tersebut.

Dalam komitmennya terhadap untuk menekankan perspektif gender dalam berbagai kebijakannya, pemerintah Swedia menerapkan juga *Gender Marker* dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada pelaku-pelaku kemanusiaan. Hal ini dilakukan Swedia sebagai bentuk komitmennya dalam menjunjung tinggi kesetaraan gender dalam berbagai bidang. *Gender Marker* sendiri yaitu alat yang mengkode pada skala 0-3, apakah proyek kemanusiaan dirancang dengan cukup baik untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki akan mendapatkan manfaat yang sama dari bantuan kemanusiaan yang diberikandan memastikan apakah bantuanitu akan memajukan kesetaraan gender. Jika proyek memiliki potensi untuk berkontribusi pada kesetaraan gender, maka penanda memprediksi apakah hasilnya mungkin akan terbatas atau signifikan. *Gender marker* ini dapat digunakan oleh tim desain

---

<sup>97</sup>op.cit, hlm. 5

proyek untuk menilai dan memperkuat potensi kesetaraan gender dari proyek-proyek dalam setiap mekanisme bantuan kemanusiaan atau pendanaan yang diberikan. Berikut tabel mengenai spesifikasi dari setiap skala kode pada *gender marker* :

Tabel 4.3 Deskripsi Skala Gender Marker

Gender Code	Description	Project Examples
0	There are <u>no signs</u> that gender issues were considered in project design. There is risk that the project will unintentionally nurture existing gender inequalities or deepen them.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Removing rubble, repairing roads, installing water systems or providing non-food items with no indication that females and males both have the right to benefit or of differences in male and female needs, skills, abilities, protection concerns etc.</li> <li>• Training that is blind to the different needs and realities of both women and men.</li> </ul>
1	The project is designed to contribute in <u>some limited way</u> to gender equality. The design could be stronger and advance gender equality more. a) The project needs assessment includes a gender analysis that is <u>not</u> meaningfully reflected in activities and outcomes OR b) At least one activity and outcome aim to advance gender equality but this is <u>not</u> supported by the needs assessment	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analysing the nutritional needs of men, women, girls and boys; local food preparation; cooking &amp; sharing practices but failing to reflect these local gender realities in activities and/or outcomes.</li> <li>• Setting up separate male/female toilets and bath areas for IDPs but providing no indication that male and female beneficiaries have a voice in ensuring the facilities are culturally appropriate and meet their respective needs.</li> </ul>
2	It is designed to <u>contribute significantly</u> to gender equality. The different needs of women/girls and men/boys have been analyzed and integrated well in the activities and outcomes.  Gender Mainstreaming	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Using vouchers, designed with inputs from male and female farmers, to provide agricultural training equally to women and men.</li> <li>• Providing demand-driven psycho-social services to girl and boy ex-combatants based on their different needs.</li> </ul>
3	The <u>principal purpose</u> of the project is to advance gender equality. The entire project either: a) assists women or men, girls or boys who suffer from discrimination creating a more level playing field OR b) focuses all activities on building gender-specific services or more equal relations between women and men.  Targeted Action	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Providing reproductive health services to men where there is documented unmet need (e.g. where existing services only target women).</li> <li>• Promoting girls' education or increasing the number of female teachers.</li> <li>• Preventing and/or responding to gender-based violence or to sexual exploitation and abuse by humanitarian workers.</li> </ul>

Sumber : Inter-Agency Standing Committee

Dengan menerapkan *gender mainstreaming*, Swedia mengharuskan semua mitra menyajikan kode *Gender Marker* untuk proposal, dan telah menyatakan bahwa mereka tidak ingin mendanai proyek yang memiliki "0 kode" (yaitu, tidak ada aplikasi untuk kesetaraan jender). Hal ini adalah pernyataan yang kuat tentang prioritas Swedia tentang kesetaraan gender dalam respon kemanusiaan dan pembangunan. Sebagai salah satu donor kemanusiaan terbesar di dunia, Swedia harus memimpin dengan contoh yang baik, terus bekerja secara strategis dalam menerapkan perspektif gender dan mendukung proses global yang mempromosikan kesetaraan gender dan mencegah kekerasan berbasis gender dalam kondisi apapun .

